



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Samarinda, Februari 2023



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang telah disinergiskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara lebih baik.

Samarinda, Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



YUDHA PRANOTO, SE

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19640817 201006 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No,mor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil Capaian Kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pergerakan Sarana Transportasi Darat,Laut dan Udara	34%	33.74%	99.24%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	80%	98.51%	123.14%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat(Angka)	100	85.48	85.48%

Dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis I dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena masih dalam tahap pemulihan pasca *covid-19* namun pergerakan pada sektor transportasi mulai mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk capaian Sasaran Strategis II dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Tahun 2018-2023, hal tersebut perlu ada komitmen pimpinan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja untuk ke depannya. Kemudian untuk capaian Sasaran Strategis III dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 belum mencapai target, namun akan diusahakan pada tahun berikutnya agar target dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Aspek Strategis Organisasi	12
1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	15
1.7. Sarana dan Prasarana Kerja	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Pencanaan Strategis	23
2.2. Indikator Kinerja Utama Dishub Prov Kaltim	34
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 2021	42
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	48
3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	50
3.4. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah (SDAP)
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2010 dan Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Pergub No. 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pergub No. 63 Tahun 2016 pasal 249, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

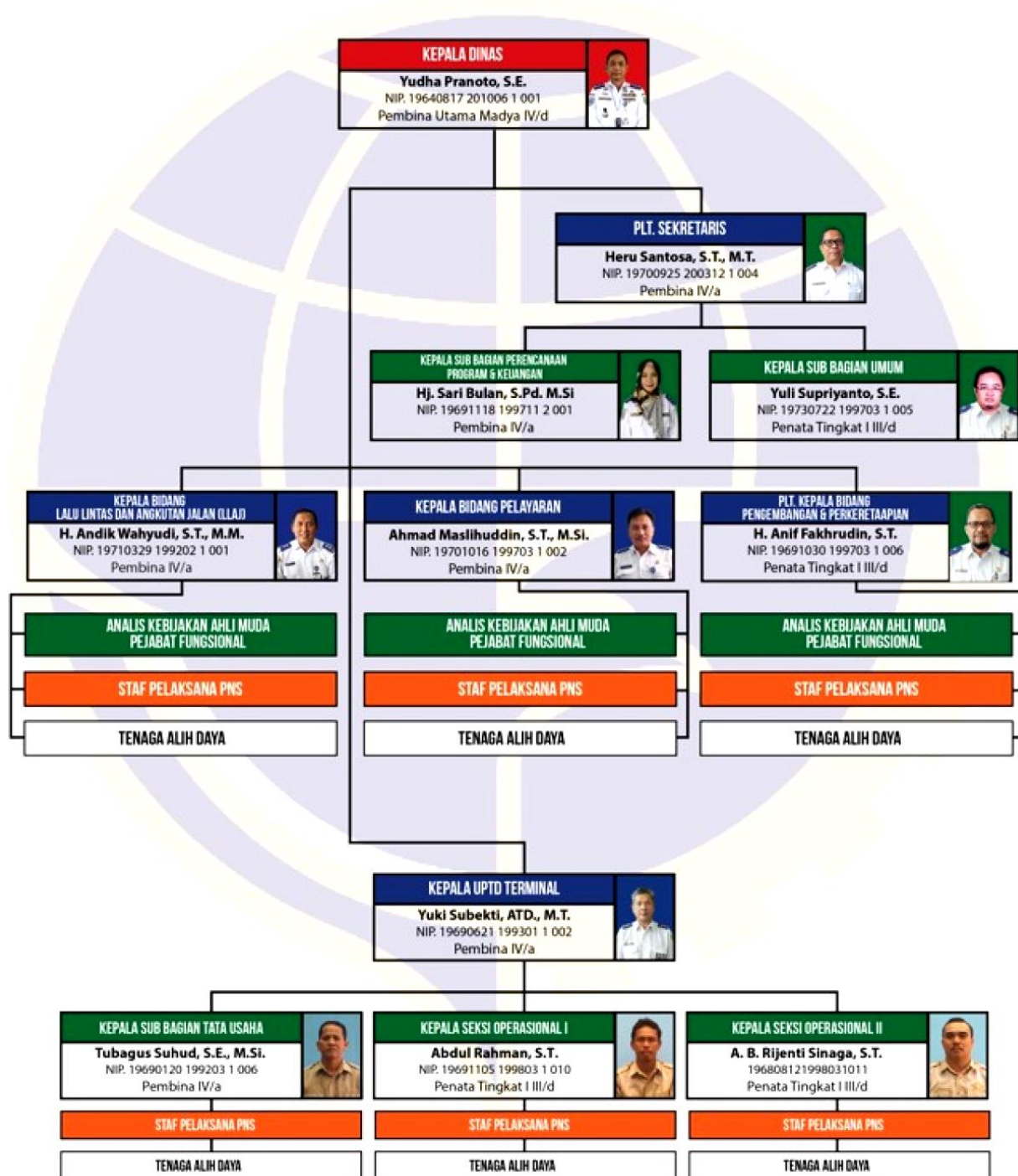
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan, artinya masing-masing komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2022



Sumber: Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris												
Kepala Bidang LLAJ	1		1				1					
Kepala Bidang Pelayaran	1		1				1					
Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian												
Kepala UPTD Terminal	1		1				1					
Kepala Subbag Umum	1		1				1					
Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan	1		1				1					

Kasubbag Tata Usaha Terminal	1			1			1					
Kasi Operasional I Terminal	1			1				1				
Kasi Operasional II Terminal	1			1				1				
Pengelola Terminal	27	4	2	10	18	1	2	5	1	21	2	
Jlh PNS	62	19	2	3	1		12	22	3	41	3	
Jlh Honor/PTT	76	35	-	-	-	-	3	31	3	65	4	5
Jlh PNS +Honor/PTT	137	54	-	-	-	-	15	53	6	106	7	5

Sumber : Sub Bag Umum Sekretariat Dishub Kaltim Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak 81 orang Pegawai Negeri Sipil dan 111 orang Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing).

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	SLTP	3	-
3	SLTA	34	7
4	Sarjana Muda (D-III)	1	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	14	8
6	Pasca Sarjana (S-2)	11	1
7	Doktor (S-3)	-	-
	Jumlah	63	18
	TOTAL	81	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	-	-
2	I/b Juru Muda Tk. I	-	-
3	I/c Juru	-	-
4	I/d Juru Tk. I	1	-
5	II/a Pengatur Muda	1	-
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	2	-
7	II/c Pengatur	6	-
8	II/d Pengatur Tk. I	20	3
9	III/a Penata Muda	3	-
10	III/b Penata Muda Tk. I	7	6
11	III/c Penata	-	4
12	III/d Penata Tk. I	12	5
13	IV/a Pembina	7	1
14	IV/b Pembina Tk. I	2	-
15	IV/c Pembina Utama Muda	-	-
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	-
	Jumlah	62	19
	TOTAL	81	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	3	-
3	Eselon IV	1	1
	Jumlah	5	1
	TOTAL	6	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2020

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SD	3	2
2	SMP	4	-
3	SMA	49	16
4	D-III	1	2
5	S-1	19	12
6	S-2	-	3
	Jumlah	76	35
	TOTAL	111	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	1	-
2	Sekretaris	1	-
a	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	-	1
b	Sub Bagian Umum	1	-
3	Kepala Bidang Perhubungan LLAJ	1	-
4	Kepala Bidang Pelayaran	1	-
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	-	-
6	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	30	15
Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		35	15
TOTAL		50	

1	Kepala UPTD Terminal	1	-
a	Sub Bagian Tata Usaha	1	-
b	Seksi Operasional I	1	-
c	Seksi Operasional II	1	-
2	Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	23	4
Jumlah Keseluruhan Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		27	4
TOTAL		31	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Dinas perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pada hakekatnya memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan pencapaian visi misinya terutama pada bidang kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki peran penting dalam menvapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tujuan meningkatkan akseibilitas wilayah terutama pada aspek transportasi di Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang tertib, teratur,

tepat waktu, bersih dan nyaman. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perhubungan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan, secara umum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan strategis Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas wilayah” yang ditunjang dengan arah kebijakan berupa :

1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
2. Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Dimana hal tersebut diatas di implementasikan dalam program prioritas :

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

Selanjutnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim melakukan identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Teknik identifikasi menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam lingkungan internal identifikasi dalam bentuk Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas. Sedangkan dari lingkungan eksternal diidentifikasi dalam bentuk Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang merupakan dorongan dan hambatan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Adanya kewenangan pengelolaan sektor perhubungan di daerah;

- b. Adanya dukungan dari berbagai stakeholders transportasi baik instansi vertikal maupun di daerah serta organisasi profesi;
- c. Adanya potensi sumber daya alam serta deregulasi perundang-undangan yang memberikan peluang kepada daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk turut berkiprah dalam dunia transportasi.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas memerlukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang profesional;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga belum tergalinya potensi pengelolaan bidang tugas seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya peluang peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur;
- b. Terdapat minat penanaman modal di daerah yang berhubungan erat dengan dunia usaha transportasi;
- c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penataan dan pengembangan wilayah.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Rendahnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
- b. Masih rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat pelaku transportasi.

Dengan menggunakan metode SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada dikelompokkan kedalam 4 strategi yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/kendala
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari strategi tersebut diambil faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber dana secara optimal;
3. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang transportasi;
4. Penegakan hukum secara konsisten (taat azas);
5. Peningkatan, koordinasi antar/inter instansi;
6. Peningkatan mutu pelayanan.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Adapun Permasalahan yang ada pada Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Perhubungan LLAJ, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain data menunjukkan angka kecelakaan cukup tinggi namun tingkat fatalitas menurun;
2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;

3. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan *over loading* (ODOL) di jalan;
4. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
5. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Belum optimalnya pelaksanaan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
7. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
8. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Permasalahan Bidang Pelayaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pelayaran, antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang berbeda antara PP No. 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan No. 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
2. Belum tersusunnya Dokumen Studi Lingkungan di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
3. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
4. Belum terciptanya pelaporan angkutan laut secara periodik dan berjenjang
5. Belum tersusunnya dokumen administrasi (izin lokasi, izin pembangunan dan izin operasional) terhadap beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
6. Perlunya rasionalisasi luasan DLKR dan DLKP untuk beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur

7. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan pelabuhan laut di Kalimantan Timur
8. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus dan atau dermaga khusus di Kalimantan Timur
9. Beberapa pelabuhan laut belum dikembangkan sesuai dengan masterplan sehingga berakibat kapasitas pelabuhan laut tidak sebanding dengan aktifitas/permintaan jasa angkutan laut
10. Pelayanan pelabuhan masih konvensional
11. Sempit dan dangkalnya alur pelayaran disebabkan pelabuhan berada di sungai
12. Masih minimnya fasilitas keselamatan pelayaran
13. Kondisi keamanan dan tertib di pelabuhan laut belum optimal karena sarana kapal patroli, kapal navigasi dan kapal pandu jumlahnya terbatas dan umurnya relatif tua
14. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di kabupaten Kutai Timur yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

3. Permasalahan Pengembangan dan Perkeretaapian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, antara lain :

1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga sungai, danau dan penyeberangan;
4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;

6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. Permasalahan UPTD Terminal

1. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
6. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Type B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
7. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Tipe B di Kalimantan Timur;
8. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
9. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
10. Belum adanya regulasi tentang legalitas aset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
11. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembelian	Kondisi
A	KENDARAAN Roda 4			
1	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1042 BZ	2021	Baik
2	Toyota Veloz	KT 1396 B	2022	Baik
3	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1716 BZ	2011	Baik
4	Mitsubhisi Expander	KT 1775 B	2022	Baik
5	Toyota Hilux	KT 8486 BZ	2021	Baik
6	Toyota INOVA	KT 1337 BZ	2010	Baik
7	Isuzu Touring 541 LM 25 Long	KT 1907 BZ	2003	Rusak Ringan
8	Suzuki Mega Carry Extra / Pick Up	KT 8879 BZ	2012	Rusak Ringan
9	Suzuki AVP SGX	KT 1564 BZ	2010	Baik
10	Toyota Kijang STD	KT 1273 BZ	2001	Rusak Berat
11	Ford Everest 2,5 XLT	KT 1369 BZ	2004	Baik
12	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 8336 BZ	2005	Baik
13	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 1902 BZ	2003	Rusak Berat

14	Ford Ranger SGL	KT 8473 BZ	2004	Rusak Berat
15	Isuzu TBR 541 LM 25 Long	KT 2369 BZ	2003	Rusak Ringan
16	Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
17	Toyota Avanza	KT 1540 BZ	2008	Baik
18	Toyota Avanza	KT 1015 BC	2005	Baik
19	Toyota Kijang STD	KT 2408 BZ	2001	Rusak Berat
B	KENDARAAN Roda 2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda CB15A1RRF	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3934 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6396 MZ	2002	Baik
15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik

18	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6379 MZ	2012	Baik
19	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
20	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
21	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
22	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
23	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
24	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
25	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2309 B	2021	Baik
26	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2317 B	2021	Baik
27	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2324 B	2021	Baik
28	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2386 B	2021	Baik
29	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2372 B	2021	Baik
30	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2284 B	2021	Baik

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov Kaltim berjumlah 19 kendaraan roda empat dan 30 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 1.8
Luas Bangunan dan Sarana Prasarana Penunjang Dinas
Perhubungan Prov Kaltim 2021

No	Uraian	Luas Bangunan (M ²)	Jumlah	Luas Keseluruhan (M ²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	Gedung koperasi	180	1	180
3	Gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin	32	1	32
6	Bangunan baru	202	2	404
7	Ruang Rapat		2 Unit	
8	Area Parkir		2 Ruang	
9	Komputer		75 unit	
10	Telepon		2 Unit	
11	Website		1 Buah	
12	Papan Pengumuman		1 Unit	
13	Videotron		1 Unit	
	Luas Bangunan Keseluruhan			7.092 M ²

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sektor perhubungan Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. VISI

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai

dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023 adalah :

“BERANI UNTUK KALTIM YANG BERDAULAT ”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1) Berdaulat Salam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesionalitas dan Berorientasi Pelayanan Publik

Dari Beberapa Misi diatas Dinas Perhubunga Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus sasaran pada misi ke-3 (tiga) yaitu **“Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan”**

3. TUJUAN

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan

4. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan pada peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan transportasi secara adil, merata dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi sehingga pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

Sasaran-1 :

- Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman

Sasaran-2 :

- Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Sasaran-3 :

- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran sektor perhubungan sesuai RPJMD yaitu:

“Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Provinsi Sektor Perhubungan Tahun 2019-2023 (RPJMD)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Lima Tahunan					Target Kinerja Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Perhubungan								
1	Jumlah Penumpang yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	Penumpang (Orang) dan Barang (Ton)	10.392.536 (orang) dan 325.051.663 (Ton)	10.705.000 (Orang) dan 334.805.000 (Ton)	11.026.150 (Orang) dan 334.850.000 (Ton)	4.500.000 (Orang) dan 307.000.000 (Ton)	6.000.000 (Orang) dan 337.000.000 (Ton)	8.100.000 (Orang) dan 370.000.000 (Ton)	8.100.000 (Orang) dan 370.000.000 (Ton)

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019 - 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Lima Tahunan yang mendukung Visi dan Misi serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat

MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET KINERJA KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	25	30	32	33	34	35	35
2		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50	60	70	80	85	85
3		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Program
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat

MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	83%	83%	84%	85%	87%	88%	88%
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kab/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	0%	0%	0%	20%	50%	80%	80%
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	846 Kasus	570 Kasus	448 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	342 Kasus

2	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	846 Kasus	570 Kasus	448 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	342 Kasus
3		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dishub Kaltim 2019-2023

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Program Dan kegiatan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	180 Izin	190 Izin	200 Izin	250 Izin	300 Izin
						Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	40 Izin	45 Izin	50 Izin	100 Izin	100 Izin
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	80%	90%	95%	97%	97.50%
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	75%	78%	81%	83%	93.34%

1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api	0 Penetapan	0 Penetapan	0 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	5 Perencanaan	4 Perencanaan
							Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani (Orang)	550.000 Orang	600.000 Orang	650.000 Orang	700.000 Orang	750.000 Orang
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	0 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan

2	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	40%	50%	60%	70%	80%
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	42.50%	50%	55%	75%	85%
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	24 Izin	24 Izin	24 Izin	24 Izin
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin

3	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72.32%	72.40%	72.70%	75%	75.50%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30%	32%	35%	38%	40%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	35%	40%	45%	50%	60%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber Renstra Dishub 2019-2023

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET			REALISASI		
								2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	1. Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	Mengukur Persentase Pergerakan Angkutan Darat, Laut dan Udara yang beroperasi di Kalimantan Timur	$f(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Perhubungan Tahun} - (n-1)]}{\sum \text{Sarana Perhubungan Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran	32%	33%	34%	17%	20%	33.74%
						Bidang Pengembangan	Kepala Bidang Pengembangan						
						UPTD Terminal	Kepala UPTD Terminal						
2.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	2. Persentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ	%	Mengukur Persentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ di Kalimantan Timur	$f(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ} \text{ Tahun} - (n-1)]}{\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ} \text{ Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ	60%	70%	80%	68.63%	89.49%	98.51%
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Sarana & Prasarana Transportasi di Kalimantan Timur	$NRR \text{ Tertimbang per unsur} = NRR \text{ per unsur} \times 0,11$	Bidang Sekretariat	Sekretaris Dishub Prov. Kaltim	100	100	100	80.04	95.52	95.75

Sumber Renstra Dishub 2019-2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renstra telah ditetapkan target per tahun pencapaian kinerja hingga lima tahun ke depan dan untuk tahun 2022 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	34
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	80
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

2.3.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan/tahun anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja di Tahun 2022 pada Perangkat daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Kesuma Bangsa No. 1 ☎ (0541) 737267, 739882 Faks (0541) 207033
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Pranoto, SE

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

YUDHA PRANOTO, SE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 201006 1 001

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	34
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	80
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dishub 2022

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Prov Kaltim melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni Sebesar **Rp. 51.039.267.661,-**

2. Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel 2.8
Target Belanja Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Pagu	Rp 51.039.267.661	Rp 45.774.032.620	89,68%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggara	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Rp. 3.787.040.000	Rp. 3.471.315.415	91,66%
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan	Rp. 18.786.669.762	Rp. 17.201.253.416	91,56%

	Transportasi Darat			
3	Meningkatnya Indeks Keputusan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Rp. 28.465.557.899	Rp. 25.101.463.789	88,18%

Sumber: Sub Bagian Prencanaan Program dan Keu Dishub 2022

Tabel 2.10
Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Anggaran	Keterangan
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,383,422,694	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14,634,422,056	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3,390,803,000	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapiaan	396,237,000	APBD
UPTD Terminal			
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,082,135,205	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4,152,247,706	APBD
Jumlah Anggaran APBD		51,039,267,661	APBD

Sumber : DPA Dishub Prov Kaltim Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 51.039.267.661,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya (2021)

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2021

TABEL 3.1
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan/Penurunan Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.72	23.83	+0.11
2	Pengukuran Kinerja	25%	18.13	16.88	-1.25
3	Pelaporan Kinerja	15%	11.06	10.97	-0.09
4	Evaluasi Kinerja	10%	5.69	5.85	+0.16
5	Capaian Kinerja	20%	12.69	12.58	-0.11
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	71.28	70.11	-1.17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik	

Sumber: laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021

memperoleh nilai sebesar 70,11 dengan predikat Kategori “BB” dengan Interpretasi (Sangat Baik).

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim Terhadap Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Hasil tindak lanjut Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim menyajikan rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi atas implementasi Sistem AKIP sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
I	Perencanaan Kinerja :		
1.	Target Jangka Menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renstra pada Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah dilakukan monitoring pencapaiannya, proses pemulihan setelah pandemi virus Covid-19 menunjukkan hasil yang meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2021. - Pelaksanaan program kerja dan kegiatan mengacu pada renstra, iku dan sasaran indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang. 	Sudah; Perubahan sejalan dengan Perubahan RPJMD.
2.	Dokumen Renstra agar direviu secara berkala	Capaian Renstra telah dilaksanakan monitoring secara berjenjang per Triwulan untuk laporan capaian atau realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung sesuai dengan rekomendasi secara elektronik pada aplikasi	Sudah; Telah dilakukan evaluasi bersamaan dengan Renstra Perubahan untuk penyesuaian dengan nomenklatur Permendagri 90 dan

		https://evdoren.kaltimprov.go.id/	Target
3.	Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian	Kegiatan coffee morning/rapat Pejabat Eselon III serta staf yang dilaksanakan di setiap awal pekan (hari senin) dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas sebagai indikator pembahasan evaluasi kinerja pegawai yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan kedepan dengan mengacu pada renstra serta adanya dokumen rencana aksi per triwulan atas capaian, kendala dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan dan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.	Sudah; Evaluasi terhadap Rencana Aksi dilaksanakan setiap Triwulan dan dijadikan dasar evaluasi terhadap kinerja pejabat dan pegawai oleh Pimpinan dalam pengarahannya dan pengorganisasian

II	Pengukuran Kinerja :		
1.	Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya secara berkala	Evaluasi target kinerja Eselon III dimonitor secara rutin dan dituangkan dalam dokumen capaian atas rencana aksi Dinas Perhubungan Prov Kaltim dikumpul secara berkala per triwulan kepada Biro Organisasi.	Sudah

2.	Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Hasil pengukuran kinerja berjenjang telah dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment internal Dishub Prov Kaltim Evaluasi pimpinan terhadap hasil capaian kerja Eselon III	Sudah
3.	IKU telah direviu. Ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan	IKU Dinas Perhubungan Prov. Kaltim akan di reviu menyesuaikan IKU Kementerian Perhubungan dengan tetap menyelaraskan dengan dokumen RPJMD	Sudah
4.	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti	Dokumen capaian atas rencana aksi dan dokumen monitoring evaluasi pembangunan program prioritas menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja 1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Per triwulan 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per semester	Sudah
III	Pelaporan Kinerja :		
1.	Penyajian informasi kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan	- Data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja berasal dari pengumpulan data dari masing-masing	Sudah

		<p>penanggung jawab program/kegiatan yang dapat ditelusuri dan terverifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap penanggung jawab program dan kegiatan akan diminta data dan informasi setiap per triwulan untuk diketahui sejauh mana kegiatan itu berjalan 	
2.	<p>Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja, serta digunakan untuk penilaian kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan realisasi program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Dokumen Capaian realisasi berjenjang menjadi dasar acuan untuk peningkatan program dan kegiatan berjalan 	Sudah

IV	Evaluasi Internal :		
1.	<p>Melakukan pemantauan secara optimal terhadap capaian kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring secara berjenjang dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana. - Hasil capaian realisasi tertuang dalam dokumen capaian realisasi setiap pertriwulan - Monitoring secara berjenjang dengan 	Sudah

		melaporkan hasil capaian kinerja sesuai targetnya untuk dilakukan pengukuran capaian.	
2.	Evaluasi program dapat memberikan rekomendasi peningkatan kinerja dan dapat mengendalikan kinerja untuk memberikan alternatif perbaikan atas rencana aksi untuk disetiap periodenya	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana aksi telah terpantau sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan - Dokumen evaluasi rencana aksi menjadi acuan dalam perbaikan peningkatan capaian program/kegiatan - Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. - Memilah setiap program kegiatan dengan indikator kinerja utama dimana setiap program kegiatan harus memiliki data bukti kerja seperti dokumentasi, laporan kerja bulanan sampai dengan hasil akhir capaian kerja. 	Sudah
3.	Hasil Evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan dalam bentuk langkah-langkah nyata	Program Bidang Perhubungan telah seusai dengan Permendagri 90 tahun 2019 beserta perubahannya.	Sudah

V	Pencapaian Kinerja :		
1	Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi dapat diandalkan	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, penanganan Pandemi COVID-19 oleh Pemerintah mendorong perbaikan kinerja output maupun outcome program dan kegiatan dan peningkatan akuntabilitas informasi juga semakin baik.	Sudah

Sumber : Subbag. Perencanaan program dan keuangan 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi terhadap permasalahan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik dari Tahun sebelumnya.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Mengukur Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi Darat, Laut dan Udara	%	34%	Triwulan I	8,5% (93.205)	7,96% (87.261)	93,62
					Triwulan II	8,5% (93.206)	8,66% (95.000)	101,92
					Triwulan III	8,5% (93.206)	8,57% (93.956)	100,80
					Triwulan IV	8,5% (93.205)	8,55% (93,768)	100,60
2.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	80%	Triwulan I	20%	0	
					Triwulan II	20%	0	
					Triwulan III	20%	49,257%	246,285
					Triwulan IV	20%	44,745%	246,285

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mencapai target yang telah telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis 2018-2023.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman:

Indikator sasaran Strategis 1 (satu):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi capaian :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	34	33,74	99,24

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang sering disebut PPKM berangsur-angsur longgar sehingga aktivitas masyarakat kian membaik dan kembali normal, oleh karena itu angka realisasi pada tahun 2022 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2021	2022	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	20%	33,74%	68,7 %

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami kenaikan dari tahun 2021, kenaikan ini cukup signifikan seiring PPKM yang berangsur-angsur longgar sehingga aktivitas masyarakat kian membaik dan kembali normal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35%	33,74%	96,4 %

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2022

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 1 Pada Tahun 2022 mencapai 33,74% terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan sebesar 96,4 %.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Sasaran Strategis I (Indikator : Persentase Pergerakan sarana Transportasi)

Analisis Keberhasilan & Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 1

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur secara signifikan dapat mempengaruhi tingginya angka kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi, karena salah satu fungsi strategis transportasi adalah menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan di Kalimantan Timur, adapun jumlah pergerakan kendaraan (transportasi) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Pergerakan Kendaraan Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Pergerakan
1	Terminal Tipe A	30.782
2	Terminal Tipe B	42.486
3	Angkutan Udara	51.561
4	Angkutan Laut / KSOP & KUPP	152.880
5	Angkutan Penyeberangan Kariangau dan Penajam	64.810
6	Angkutan Sungai	1.684
7	Angkutan Darat (tidak melalui terminal)	25.781
	Jumlah	369.984

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Dapat diketahui pada tabel di atas bahwa jumlah pergerakan transportasi di Kalimantan Timur Tahun 2022 berjumlah 369.984 kendaraan, capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 (216.945).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Capaian Sasaran Strategis I (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2021 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy
- Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan
- Pembinaan Badan usaha
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran

- **Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi**

1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif;
2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum);
3. Melakukan pengintegrasian antar *stakeholder* perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala (Pemantauan Lalu Lintas Harian) sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1
(Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan
Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pengelolaan Pelayaran		Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87%	85%	97.70%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASD	Izin	250	107	41.80%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	1	100%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	100	88	88%	Kabid Pelayaran	APBD
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpulan Regional	%	97%	97%	100%	Kabid Pelayaran	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	50	50	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	427	195	45.66%	Kabid LLAJ	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	700000	377969	54%	Kepala UPTD	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Perencanaan	5	5	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Kaltim 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 1 Dinas perhubungan memiliki 3 (tiga) Program strategis yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pelayaran :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan ;
2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas ;
4. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Program Pengelolaan Perkeretaapian :

1. Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal);
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Dishub);
3. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dishub).

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	99,24	91,66	7,58

Sumber: Olah data 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 7,58%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Indikator sasaran Strategis 2 (dua):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi capaian :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	80	98,51	123,14

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 123,14% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	89,49%	98,51%	10.08%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 2 (Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 10,08%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.12
Realisasi Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	85%	98,51%	105,28%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 2 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 105,28% dari target 85%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 2 (Indikator : Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan)

- **Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 2**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat).

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor/Rampcheck (Angkutan Orang dan Barang).

Tabel 3.13
Tabel Hasil Rampchek Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun		
	Awal 2021	2022	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	203	102	250
Angkutan Barang	385	357	400
Jumlah	588	459	650
Persentase		70,61%	

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 102 kendaraan jenis angkutan umum dan 357 kendaraan jenis angkutan barang. Diketahui total hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada Tahun 2022 berjumlah 459 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 70,61%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselaan jalan yang terpasang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Jumlah Prasarana Yang Terpasang Pada Tahun 2022

Jenis Prasarana	Tahun			
	Awal 2021	2022	Jumlah Terpasang Data Awal + 2021	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	5.880	105	5.985	16.000
Marka	291.635	50.008	341.643	2.237.725
Pagar	5.628	-	5.628	89.509
LPJU	35	62	97	235
Persentase	12.93%		25.06	100%

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2022 untuk rambu berjumlah 105 unit, Marka jalan 50.008 m² dan LPJU 62 unit. Sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 25.06%.

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2022
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

Sumber : Bidang LLAJ Dishub Prov. Kaltim 2022

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa angka penilaian Wahana Tata Nugraha khusus pada kelengkapan prasarana terminal memiliki capaian rata-rata 69 %. Pada Tahun 2022, Kementerian Perhubungan tidak mengadakan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat nasional pada tahun 2022.

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Tabel 3.16
Angka Kasus Kecelakaan

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Polresta Samarinda	120	225	170	109	96	87	78
2	Polres Balikpapan	140	179	132	88	47	56	26
3	Polres Bontang	38	76	92	55	56	31	20
4	Polres Kukar	145	296	152	40	77	78	28
5	Polres Kutim	90	59	50	34	23	19	6
6	Polres Kubar	30	55	48	103	22	29	9
7	Polres Berau	48	46	85	100	27	55	9
8	Polres Paser	59	56	149	80	71	41	0
9	Polres PPU	43	40	69	44	43	31	19
	JUMLAH	736	705	1.193	868	570	448	195

Sumber : Data Polda Kaltim 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lantas di semua Kab/Kota mengalami penurunan.

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan**

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten;

3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui :
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) Mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2
(Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	427	195	154.33%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	70	75.23%	107.47%	Kabid LLAJ	APBD
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	%	85	47.36	55.71%	Kabid LLAJ	APBD
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Izin andalalin yang di Keluarkan	Izin Andalalin	20	20	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	75	75	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	Penetapan	1	0	0%	Kabid LLAJ	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang Dikeluarkan	Izin	24	25	104.17%	Kabid LLAJ	APBD

		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	10	11	110%	Kabid LLAJ	APBD
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jalan Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	Trayek	35	35	100%	Kabid LLAJ	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) Program strategis yaitu sebagai berikut :

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
3. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Provinsi;
6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi;
8. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan

Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	123,14	91,56	31,58

Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2022

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan

Indikator sasaran Strategis 3 (tiga):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi capaian :

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	85,48	85,48

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis III memiliki realisasi 85,48% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	84,80%	85,48%	0,80%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 0,80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.21
Realisasi Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	85,48	85,48

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 3 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 85,48 dari target 100.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 3 (Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat)

• Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 3

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat).

1. Hasil Survei Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan

Tabel 3.22
Hasil IKLI dan SKM Pada UPTD Terminal

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi				
	Tahun 2018 (IKLI)	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)	Tahun 2021 (SKM)	Tahun 2022 (SKM)
1.	76.6	79.22	79.68	80.21	81.08

Sumber : IKLI BAPPEDA Tahun 2018 dan SKM Dishub Kaltim 2022

Hasil SKM Tahun 2022

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 81.63
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 81.03
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 81.72
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 80.71
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 80.74
6. Terminal Paser memiliki nilai : 80.83
7. Terminal Berau memiliki nilai : 80.95

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Terminal Tipe B) memiliki Nilai **81.08 dengan kategori Baik**.

Dari tabel dan capaian SKM di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 76.6 sedangkan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada 7 (Tujuh) Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai **81.08 (B)**.

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Selain melakukan survei kepuasan masyarakat pada Terminal Tipe B Prov. Kaltim, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (terkait pelayanan), antara lain:

- Layanan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan kartu pengawasan (KP)
- Layanan peremajaan/penggantian dan penambahan kendaraan
- Layanan penerbitan surat keputusan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
- Layanan penerbitan surat izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM)
- Layanan penerbitan surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT)

- Layanan izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau
- Layanan izin pengoperasian angkutan penyeberangan
- Layanan kartu pengawasan izin trayek ASDP

Tabel 3.23
Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

No	Indeks Kepuasan Layanan sesuai standar pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
	IKM TAHUN 2021	IKM TAHUN 2022
NILAI IKM	95.52	95.75

Sumber : SKM Dishub Kaltim 2022

Untuk mencapai capaian sasaran strategis 3 dinas perhubungan membagi bobot Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70% untuk IKM UPTD Terminal dan 30% untuk IKM Dinas Perhubungan sehingga diperoleh hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar **85.48** dari target 100.

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan atau sarana dan prasarana yang ada di setiap Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Prov. Kaltim seperti Kamar mandi (WC Umum) yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum;
2. Perlu adanya peningkatan penyusunan survei kepuasan masyarakat dengan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap matang atau lebih berpengalaman agar pengolahan data yang didapat bisa lebih akurat

dan lebih matang dengan demikian maka dapat membantu instansi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Khususnya UPTD Terminal Tipe B dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 3
(Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
Dinas Perhubungan									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	95.75	95.75%	Sekretaris	APBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	75	73.05	97.40%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	38	38	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	50	50	100%	Kasubbag Umum	APBD

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	95	95	100%	Kasubbag Umum	APBD
UPTD Terminal									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	81.08	81.08%	Kepala UPTD Terminal	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	25	12.5	50%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	25	25	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 3 Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) Program yaitu sebagai berikut :

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2022
1.	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	6.000.000 Orang dan 337.000.000 Ton	8.513.323 Orang dan 513.031.229 Ton

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2022

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2022 dapat melebihi Target Indikator Tujuan.

Tabel 3.26
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase	Pagu APBD	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2021	Rp 62.692.443.000	Rp 51.815.574.225	82.65%	Rp 62.692.443.000	4	19	4	19	APBD
2022	Rp 51.039.267.661	Rp 45.774.032.620	89.68%	Rp 51.039.267.661	4	24	4	24	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2022

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan Anggaran Tahun 2022 memiliki nilai penyerapan sebesar 89,68% sedangkan tahun 2021 penyerapan realisasi anggaran sebesar 82,65%.

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	34	33,74	99,24%	3,787,040,000	3,471,315,415	91,66%
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	80	98,51	123,14%	18,786,669,762	17,201,253,416	91,56%
3	Meningkatnya Indeks Keputusan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	100	95,75	95,75%	28,465,557,899	25,101,463,789	88,18%
					51,039,267,661	45,774,032,620	89,68%

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,383,422,694	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14,634,422,056	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3,390,803,000	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	396,237,000	APBD
UPTD Terminal			
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,082,135,205	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4,152,247,706	APBD
Jumlah Anggaran APBD		51,039,267,661	APBD

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun dalam Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Ke Empat (2022) memiliki hasil capaian sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis 1 (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) dengan indikator kinerja “Persentase Pergerakan Sarana Transportasi” memiliki target sebesar 34% dan memiliki realisasi capaian kerja 33,74% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 99,24%;
2. Pada sasaran strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat) dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan” memiliki target sebesar 80% dan memiliki realisasi capaian kerja 98,51% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 123,14%;
3. Pada sasaran strategis 3 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan) dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” memiliki target sebesar 100 dan memiliki realisasi capaian kinerja 85.48 sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 85.48%;
4. Capaian Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) yaitu 8.513.323 Orang dan 513.031.229 Ton.

4.2 Saran

Dari Analisis Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2022, diperlukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan bermanfaat diperlukan komitmen pimpinan terhadap sinergitas antara rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat terukur dengan baik;
2. Perlu adanya evaluasi secara berjenjang terkait dengan capaian-capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun berjalan untuk menunjang capaian RPJMD baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
3. Untuk mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara *stakeholder* yang terkait dalam mendapatkan data yang akan disusun pada dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN :

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Kesuma Bangsa No. 1 ☎ (0541) 737267, 739882 Faks (0541) 207033
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Pranoto, SE

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



YUDHA PRANOTO, SE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 201006 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	85
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 36,666,028,330.00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 40,724,794,840.00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 5,733,228,500.00
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 1,409,428,700.00
TOTAL		Rp 84,533,480,370.00

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


YUDHA PRANOTO, SE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 201006 1 001